



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  
TAHUN 2018**

**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  
KOTA YOGYAKARTA**

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165 Telepon 515865, 515866, 562682  
Email :[pertanahantataruag@jogjakota.go.id](mailto:pertanahantataruag@jogjakota.go.id)

## Kata Pengantar

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2018 merupakan rencana kerja tahun pertama setelah berakhirnya masa Rencana Strategis (Renstra) SKPD 2012-2016. Dikarenakan belum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 maka penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2017 masih berpedoman pada Renstra SKPD 2012-2016.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawaan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 mengakomodir program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan pembangunan Nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2018 diarahkan pada tema: ***“Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat Segoro Amarto.”*** maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan dan mengampu pekerjaan dari sebagian kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Renja Dinas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2018 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, dan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 serta merupakan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Renja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Yogyakarta, 22 Juni 2017

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	1
Kata Pengantar .....	2
Daftar Isi .....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
1.1 Latar Belakang .....	4
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU .....</b>	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD .....	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	24
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD .....	26
3.3 Program dan Kegiatan .....	26
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>43</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Renja OPD untuk tahun 2018.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra SKPD sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun berikutnya.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renja OPD, guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, difokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta melanjutkan visi pembangunan Kota Yogyakarta yang mendasarkan pada pasal 4 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2029 bahwa Pembangunan Kota diarahkan dengan visi, yaitu menjadikan "Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan".

Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 mengakomodir program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan pembangunan Nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2018 diarahkan pada tema: ***“Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat Segoro Amarto.”*** maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan dan mengampu pekerjaan dari sebagian kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam **sasaran pembangunan di Kota Yogyakarta**, sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat;
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat;
3. Harapan hidup masyarakat meningkat;
4. Melek huruf masyarakat meningkat;
5. Aksesibilitas pendidikan meningkat;
6. Daya saing pendidikan meningkat;
7. Kualitas lingkungan hidup meningkat;
8. Pendapatan masyarakat meningkat;
9. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun;
10. Kemiskinan masyarakat menurun;
11. Ketimpangan antar wilayah menurun;
12. Kunjungan wisatawan meningkat;
13. Lama tinggal wisatawan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
16. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2029;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah;
18. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016;
20. PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2018 ini adalah sebagai panduan dalam perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2018.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Renja SKPD ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada dalam Renja ke dalam KUA dan PPAS Tahun 2018.

### **1.4 Sistematika**

Sistematika Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2017, sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- BAB I           PENDAHULUAN
- BAB II          EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- BAB III        TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
- BAB IV        PENUTUP
- LAMPIRAN

## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta belum dapat disajikan sebagaimana mestinya.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan**  
**Kota Yogyakarta**

**Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2016	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017						Target program dan Kegiatan Renja SKPD tahun 2015	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun berjalan		Catatan
						Target Renja SKPD tahun 2016		Realisasi Renja SKPD tahun 2016(TW IV)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2016	Tingkat Capaian realisasi Target Kinerja Renstra	
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (9/7)	12 = (10/8)	13	14	15 = (14/5)	16

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Analisis Kinerja Pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta belum apat disajikan sebagaimana mestinya.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta**  
**Kota Yogyakarta**

NO	Indikator	SPM/ standar nasiona 1	IK K	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catata n Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.			47,90	55,83	64,25	70,58	77,25	81,97	47,90						
2.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.			30,07	35,07	40,08	45,08	50,08	55,08	30,07						

### 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang kemungkinan disebabkan karena selama ini belum tersedianya kelembagaan formal yang khusus menangani tata ruang sehingga masih ada tumpang tindih kewenangan antar instansi, atau sebaliknya ada sektor yang justru dibiarkan atau tidak tersentuh sama sekali karena ketidakjelasan instansi mana yang diharapkan bertanggungjawab. Instansi yang secara khusus bertanggungjawab menangani tata ruang belum ada, sementara saat ini dengan perkembangan kota yang cukup cepat banyak terjadi alih fungsi lahan. Hal ini jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan perkotaan di masa datang, perkembangan kota akan menjadi tidak tertata dan tidak terkendali, tidak nyaman untuk berkehidupan. Sementara sebagai sebuah kota diharapkan (1) kelestarian lingkungan kota yang berkelanjutan dapat terjaga, (2) sarana prasarana perkotaan memadai, (3) kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta (4) standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan meningkat. Selain itu (5) **pengendalian pemanfaatan ruang** yang kurang optimal diindikasikan dari (6) rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai, (7) kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi ruang privat dan rendah atau kurangnya fungsi lindung kawasan sempadan sungai.

Disisi lain permasalahan dan Isu Strategis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, meliputi :

- a. kelestarian lingkungan kota yang berkelanjutan kurang dapat terjaga,
- b. sarana prasarana perkotaan kurang memadai,
- c. kelancaran perhubungan dan lalu lintas,
- d. standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan meningkat
- e. rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai,
- f. kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi ruang privat

Fungsi Penataan Ruang berdasarkan PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi :

#### 1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

- a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau publik dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota.
- b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau privat dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota.
- c. Apabila luas ruang terbuka hijau, memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

#### 2. Pengaturan penataan ruang diselenggarakan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- c. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang.

3. **Pembinaan penataan ruang diselenggarakan untuk:**
  - a. meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang;
  - b. meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang;
  - c. meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
  - d. meningkatkan kualitas struktur ruang dan pola ruang.
  
4. **Pelaksanaan pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk:**
  - a. mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang direncanakan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat secara berkualitas; dan
  - b. mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan dilaksanakan secara terpadu.
  
5. **Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk :**
  - a. menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
  - b. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui:
    - 1) pengaturan zonasi;
    - 2) perizinan;
    - 3) pemberian insentif dan disinsentif; dan
    - 4) penerapan sanksi.
  
6. **Pengawasan penataan ruang diselenggarakan untuk:**
  - a. menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang;
  - b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang; dan
  - c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dengan partisipasi dari berbagai pihak pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kondisi daerah yang ada. Kondisi umum daerah secara makro yang diinginkan atau diproyeksikan ke depan pada akhir Pembangunan Jangka Menengah yaitu pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	81,97
2.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	55,08

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dengan partisipasi berbagai pihak, pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kondisi tata ruang yang diinginkan sebagai Sasaran Pembangunan Daerah:

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Peranserta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	74%
2	Ketimpangan antar wilayah menurun	Indeks ketimpangan wilayah	0,517
3	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks lingkungan hidup	64

Proses pelaksanaan peningkatan sarana prasarana pada akhir Renstra diharapkan dapat memperbaiki kondisi tata ruang secara optimal, termasuk penyusunan hubungan input, proses dengan output/outcomes.

Perbandingan antara RKPD 2018 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dapat disajikan sebagaimana **Tabel 2.3** berikut:

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal Tahun 2018**  
**Kota Yogyakarta**

**SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>	921.887.620	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>	921.887.620	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.	UMBULHARJO	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	251.445.000	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	251,445,000	
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	529.035.676	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	529.035.676	
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	UMBULHARJO	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	141.406.944	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	141.406.944	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>	<b>351.315.000</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>	<b>351,315,000</b>	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	UMBULHARJO	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	207,650,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	220,100,000	
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	UMBULHARJO	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	131,215,000	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	131,215,000	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>174.477.832</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>174.477.832</b>	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	UMBULHARJO	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	174.477.832	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	174.477.832	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	B				Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	B		
4	Program Pengelolaan Pertanahan		Prosentase tertib administrasi pertanahan.	68,62%	19,489,324,248	Program Pengelolaan Pertanahan		Prosentase tertib administrasi pertanahan.	68,62%	19,489,324,248	
4.1	Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan	UMBULHARJO	Persentase aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta.	70%	671,137,832	Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Persentase aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta.	70%	671,137,832	
			Teridentifikasi dan terinventarisasi tanah negara/ Pemkot yang berada di sepanjang sungai.	100%				Teridentifikasi dan terinventarisasi tanah negara/ Pemkot yang berada di sepanjang sungai.	100%		
			Terdata dan terinventarisasi Data Pertanahan se Kota Yogyakarta yang belum jelas haknya baik tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yk.	100%				Validitas Data Pertanahan se Kota Yogyakarta yang belum jelas haknya baik tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yk.	100%		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>terdokumentasi secara digital dokumen-dokumen pertanahan</i>	100%				terdokumentasi secara digital dokumen-dokumen pertanahan	100%		
			<i>tersedia data inventarisasi pertanahan sebagai database sistem informasi pertanahan</i>	100%				tersedia data inventarisasi pertanahan sebagai database sistem informasi pertanahan	100%		
4.2	<i>Pemanfaatan Pertanahan</i>	UMBULHARJO	<i>Bertambahnya aset/fasilitas publik milik Pemkot Yogyakarta</i>	8 lokasi	18,732,556,416	Pemanfaatan Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Bertambahnya aset/fasilitas publik milik Pemkot Yogyakarta	8 lokasi	18,732,556,416	
			<i>Persentase permohonan rekomendasi yang dapat diselesaikan</i>	100%				Persentase permohonan rekomendasi yang dapat diselesaikan	100%		
4.3	<i>Penyelesaian Masalah Pertanahan</i>	UMBULHARJO	<i>Kejelasan status pertanahan</i>	1 dokumen	85,630,000	Penyelesaian Masalah Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Kejelasan status pertanahan	1 dokumen	85,630,000	
<b>5</b>	<b>Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.</b>		<b>Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.</b>	61,40 %	1.519.040.748	<b>Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.</b>		<b>Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.</b>	61,40 %	1.519.040.748	
5.1	<i>Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci</i>	Kec. UH	<i>Tersedianya Draft Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.</i>	1 dokumen	601,111.416	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Tersedianya Draft Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.	1 dokumen	601,111.416	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	Kec. UH, JT, GK dan MJ.	Tersedianya kajian dan aturan tata bangunan dan tata lingkungan perkotaan.	2 dokumen	648,861,416	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Meningkatnya Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan Perkotaan.	2 dokumen	648,861,416	
5.3	Pembinaan Tata Ruang	Kec. UH	Meningkatnya pemahaman dan akses informasi penataan ruang Kota Yogyakarta.	14 kecamatan	269.067.916	Pembinaan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Meningkatnya pemahaman dan akses informasi penataan ruang Kota Yogyakarta.	14 kecamatan	269.067.916	
<b>6</b>	<b>Program Pengendalian Tata Ruang</b>		<b>Persentase Penilaian Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Tata Ruang.</b>	<b>50,25%</b>	<b>1.211.552.658</b>	<b>Program Pengendalian Tata Ruang</b>		<b>Persentase Penilaian Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Tata Ruang.</b>	<b>50,25%</b>	<b>1.211.552.658</b>	
6.1	Pengendalian Tata Ruang	UMBULHARJO	Tersedianya data rinci pemanfaatan ruang kota Yogyakarta dan kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah	2 dokumen	285.027.600	Pengendalian Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Tersedianya data rinci pemanfaatan ruang kota Yogyakarta dan kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah	2 dokumen	285.027.600	
6.2	Pengawasan Tata Ruang	UMBULHARJO	Meningkatnya kesesuaian penyelenggaraan Penataan Ruang yang tertib dan berkelanjutan.	5 dokumen	579.825.058	Pengawasan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Meningkatnya kesesuaian penyelenggaraan Penataan Ruang yang tertib dan berkelanjutan.	5 dokumen	579.825.058	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	UMBULHARJO	Terpenuhinya kebutuhan informasi tata ruang.	2 dokumen	346.700.000	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Terpenuhinya kebutuhan informasi tata ruang.	2 dokumen	346.700.000	
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>23.667.598.106</b>	<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>23.667.598.106</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Program Pengelolaan Pertanahan/ Pemanfaatan Pertanahan</b>	Kel. Gedongkiwo	Pengadaan Lahan R. Publik	300 m2	Kel. Gedongkiwo RW.11 /RT.56
		Kel. Sryodiningratan	Pengadaan Lahan dan	300 m2	Kampung Suryodiningratan
			Bangunan sebagai RTHP.		Kel. Suryodiningratan
		Kel. Sryodiningratan	Pengadaan Lahan dan	940 m2	Kampung Pugeran
			Bangunan sebagai RTHP.		Kel. Suryodiningratan
		Kel. Karangwaru	RTHP	1 unit	Kelurahan
		Kel. Tegalrejo	Pengadaan FASUM	700 m2	RW.05

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta pada tahun 2018 telah melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, tetapi selaku SKPD yang memberikan pelayanan kepada OPD hanya menampung hasil Musrenbang Kecamatan. Dan sampai sejauh ini baru mencakup 3 kecamatan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Beberapa kebijakan nasional dalam pengimplementasiannya di daerah tidak hanya terkait dukungan dan ketepatan terhadap prioritas sasaran, namun termasuk sumber daya, tenaga, sarana prasarana yang mencukupi. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, sesuai Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwal) yang mengaturnya, berkewajiban dan masuk dalam mata rantai agar kebijakan nasional dan kebijakan regional Daerah Istimewa Yogyakarta dapat tercapai dengan baik.

Urusan Tata Ruang diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 yang merupakan amanah otonomi daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang. Di lain pihak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan memberikan amanah dalam dua bidang yang diampu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yaitu Pertanahan dan Penataan Ruang. Hal ini membutuhkan pemenuhan sarana prasarana kerja dalam produktifitas kerja, sumber daya aparat pemerintahan sangatlah penting pengaruh dan perannya dalam pencapaiannya.

Pada akhirnya kebijakan nasional dapat tercapai apabila didukung oleh kebijakan dan pelaksanaan pada tingkat regional dan lokal yang baik, terstruktur dan sistematis.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

##### **3.2.1 Tujuan**

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah “Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.”

##### **3.2.2 Sasaran**

Sedangkan sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah “Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat.”

#### **3.3 Program dan Kegiatan**

##### **3.3.1 Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yaitu:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	55,83
2.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	35,07

### 3.3.2 Rencana Kinerja Tahunan 2018

Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah khususnya prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola disusun Rencana Kinerja Tahunan 2018 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	55,83
2.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	35,07

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta merencanakan program dan kegiatan tahun 2018. Program kegiatan dimaksud terdiri dari 3 program.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 serta Prakiraan Maju Tahun 2019 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah sesuai tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018**  
**Kota Yogyakarta**

**SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta**

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					921.887,620	981,956,382		
1.1	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang			Makan dan minum yang tersedia untuk	-	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	251,445,000	276,589,500		
							a.koordinasi,	132 kali						
							b.pegawai	50 orang						
							c.Tamu	180 orang						

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	24 laporan						
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang			Materai 6000 yang tersedia	300 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	529,035,676	554,439,244		
						Materai 3000 yang tersedia	300 buah							
						Jasa Pengiriman/paket	17 kali							
						STNK roda 4 yang terbayar	4 unit							
						STNK roda 2 yang terbayar	15 unit							
						Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	12 jenis							
						Jasa kebersihan kantor	12 bulan							
						Alat tulis kantor yang tersedia	69 jenis							
						Jasa Percetakan	23 jenis							
						Jasa Penggandaan	170.000 lbr							

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 jenis						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis						
							Peraturan perundangan-undangan yang tersedia	4 jenis						
							Jasa perbaikan peralatan kerja	14 jenis						
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 jenis						
							Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	141.406.944	150,927,638		

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	38 dokumen ASN						
							Jasa Pengelola Arsip	4 orang						
							Jasa Tenaga Naban	3 orang						
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					351,315,000	386,446,500		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang			Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 Jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	220,100,000	242,110,000		

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	131,215,000	144,336,500		
							a.roda 4 (empat),	4 unit						
							b.roda 2 (dua)	15 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%					174.477,832	178,615,615		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	174.477.832	178,615,615		
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen						

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
4	Program Pengelolaan Pertanahan	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang.	Tertib administrasi pertanahan.		Prosentase tertib administrasi pertanahan.	28.40 %					19.489.324.248	28.622.,765,000		
4.1	Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan			Kota Yogyakarta			Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta	25 bidang tanah	Persentase aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta.	70%	671,137,832	450,000,000		
							Pelacakan dan inventarisasi tanah negara/Pemkot sepanjang pinggir sungai.	3 Kelurahan	Teridentifikasi dan terinventarisasi tanah negara/ Pemkot yang berada di sepanjang sungai.	100%				
							Inventarisasi Data Pertanahan se Kota Yogyakarta yang belum jelas haknya baik tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yk.	9 Kelurahan	Validitas Data Pertanahan se Kota Yogyakarta yang belum jelas haknya baik tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yk.	100%				

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							Digitalisasi dokumen-dokumen vital pertanahan	1 dokumen	terdokumentasi secara digital dokumen-dokumen pertanahan	100%				
							database sistem inventarisasi pertanahan	1 dokumen	tersedia data inventarisasi pertanahan sebagai database sistem informasi pertanahan	100%				
4.3	Penyelesaian Masalah Pertanahan			Kota Yogyakarta			Penyelesaian masalah pertanahan	1 dokumen	Kejelasan status pertanahan	1 dokumen	85,630,000	72,765,000		
						Pencegahan Permasalahan Pertanahan	1 dokumen							
							<b>Prosentase Pemenuhan kebutuhan tanah untuk kepentingan umum</b>	<b>94.40 %</b>						
4.2	Pemanfaatan Pertanahan			Kota Yogyakarta			Pengadaan tanah pembangunan kantor.	2 kelurahan	Bertambahnya aset/fasilitas publik milik pemkot Yogyakarta	8 lokasi	18,732,556,416	28,100,000,000		

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							Pengadaan tanah untuk RTHP	3 lokasi						
							Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum.	3 lokasi						
							Penyelesaian permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah negara.	60 Permohonan	Persentase permohonan rekomendasi yang dapat diselesaikan	100%				
5	Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang.	Kesesuaian penyelenggaraan penataan ruang yang tertib dan Berkelanjutan.		Persentase Penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang.	63.24 %					1,519,040,753	1,592,731,000		
5.1	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci			Kota Yogyakarta			Naskah Akademik Revisi Perda RTRW	1 dokumen	Tersedianya Draft Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota	1 dokumen	601,111,416	631,240,500		
							Draft Album Peta Revisi Perda RTRW	1 dokumen						

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	1 dokumen	Yogyakarta.					
							Draft Revisi Perda RTRW	1 dokumen						
5.2	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan			Kota Yogyakarta			Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	2 dokumen	Meningkatnya Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan Perkotaan.	2 dokumen	648,861,421	678,990,500		
							Draft Perwal RTBL	2 dokumen						
5.3	Pembinaan Tata Ruang			Kota Yogyakarta			Laporan Telaah Penataan Ruang	1 dokumen	Meningkatnya pemahaman dan akses informasi penataan ruang Kota Yogyakarta.	14 kecamatan	269.067,916	282.500,000		
						Pembinaan Tata Ruang Kota Yogyakarta	1 peraturan							
						Kajian Potensi Pengembangan Sistem Pedestrian Kota Yogyakarta	1 dokumen							
						Kajian Evaluasi dan Identifikasi Potensi Rumah Susun di Kota Yk.	1 dokumen							

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
6	Program Pengendalian Tata Ruang	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang.	Kesesuaian penyelenggaraan penataan ruang yang tertib dan Berkelanjutan.		Persentase Penilaian Pelaksanaan , pengendalian dan pengawasan tata ruang.	22.56 %					1,213,577,658	1,396,360,173		
6.1	Pengendalian Tata Ruang			Kota Yogyakarta			Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.	1 dokumen	Tersedianya data rinci pemanfaatan ruang kota Yogyakarta dan kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah	1 dokumen	285,027,600	375,157,610		
6.2	Pengawasan Tata Ruang			Kota Yogyakarta			Laporan Penaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengawasan Tata Ruang (Turbinlakwas)	1 dokumen	Meningkatnya kesesuaian penyelenggaraan Penataan Ruang yang tertib dan berkelanjutan.	5 dokumen	579.825.058	637.807.563		
						Laporan Standar Pelaksanaan Minimal (SPM) Penataan Ruang.	1 dokumen							

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
							Laporan Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang.	1 dokumen						
							Neraca Penatagunaan Tanah.	1 dokumen						
							Penyusunan Kajian Perangkat Pengendalian Penataan Ruang	1 dokumen						
6.3	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang			Kota Yogyakarta			Kajian Database Spasial Penataan Ruang	1 dokumen	Terpenuhinya kebutuhan informasi tata ruang.	2 dokumen	346.700.000	381.370,000		
						Updating Peta Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	1 Laporan							
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>										23,667,598,106	33,156.849.670		

## **BAB IV PENUTUP**

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Visi dan Misi RTRW Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2018.

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitas pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terakomodasi, terintergrasi dan bersinergi serta berkelanjutan dengan sesama SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Yogyakarta, 22 Juni 2017

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  
Kota Yogyakarta

Ttd.

Ir. Hari Setyowacono, MT.  
NIP. 19640126 199303 1 005